

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Riwanto. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Carlton Clymer Rodee, dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Rajawali Pers. Jakarta.
- C.F. Strong. 2015. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Nusa Media. Bandung.
- Feri Amsari. 2011. *Perubahan UUD 1945 : Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Gotfridus Goris Seran. 2013. *Kamus Pemilu Populer : Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Hanta Yuda AR. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati (Dari Dilema ke Kompromi)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- H. Dahlan Taib, dkk. 2013. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Inu Kencana Syafii. 2000. *Ilmu Politik*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Janedjiri M. Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Press (Konpress). Jakarta.
- Jimly Asshidiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- K.C. Wheare. 2015. *Konstitusi-Konstitusi Modern* (Diterjemahkan dari karya K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, Oxford University Press, 1996). Nusa Media. Bandung.
- Khairul Fahmi. 2011. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mexasai Indra. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum di Indonesia* (Ed. Revisi, Cet.6). Rajawali Pers. Jakarta.
- Muhadam Labolo. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Munir Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Refika Aditama. Bandung.
- Munir Fuady. 2014. *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Saldi Isra. 2017. *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat*. Themis Publishing. Jakarta.
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Syamsuddin Haris, dkk. 2016. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Thomas Meyer. 2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi : Sembilan Tesis*. Feriedrich-Ebert-Stiftung (FES). Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I. 2010. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Buku V Pemilihan Umum (Edisi Revisi). 2010. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## **C. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dalam perkara Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017 dalam perkara Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## **D. Website, Tesis, Jurnal, Koran dan lain-lain**

Denny Indrayana, *Sistem Presidensial yang Adil dan Demokratis* (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), Yogyakarta, 6 Februari 2012.

Harian Kompas, Tanggal 17 April 2017.

<https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/10/13/partai-politik-islam-dalam-peta-politik-indonesia/>. Diakses pada 22 November 2017, Pukul 02.27 WIB.

<http://perludem.org/2017/09/07/resmi-perludem-dan-kode-inisiatif-daftarkan-gugatan-uu-pemilu-ke-mk/> diakses pada 28 Oktober 2017, Pukul 23.36 WIB.

Makalah Dinamika Partai Politik dan Demokrasi, hlm. 4. Diakses melalui [www.jimly.com](http://www.jimly.com) pada 22 November 2017, pukul 03.46 WIB.

Muhammad Aziz Hakim. 2012. *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi*. Tesis. FHUI. Jakarta.

Pataniari Siahaan. 2017. *Partai Politik dan Pemilihan Umum Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jurnal Ketatanegaraan. Volume 005.

Pengantar Dasar Partai Politik dan Demokrasi. Diakses melalui <https://mediappr.wordpress.com/> pada 22 November 2017, Pukul 02.39 WIB.

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Acara Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dalam Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017), Jakarta, 24 Oktober 2017.

